

REVITALISASI PERAN ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA PALESTINA MERDEKA

Mardenis

Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang -25163 telp. (0751) 72985, Fax. 778109,
e-mail:fh-ua@yahoo.com

Abstract

One of prolonged international conflict and no body knows how long the conflict will end is Arab/Palestina – Israel conflict. This conflict is prolonged, as well as due to a blind support by the United States toward Israel, but also because the UN structure, especially the structure of UN Security Coyncil since its inception is not democratic and not representative. Therefore, for this conflict may soon be over and the dreem of Palestinians to have a fully independent and sovereign State, absolutely did the restricting of the UN Security Council to be more democratic and representative. In this framework the hole of Islamicd organizations (OIC) is very important and strategic to build solidarity and solidity of Islaamic Countries and the State of Muslim Majority Countries in order to urge the UN to restructure themselves towards a more democratic United Nations.

Key words : Palestinian, OIC

Abstrak

Salah satu konflik internasional yang berkepanjangan dan entah sampai kapan akan berakhir adalah konflik Arab/Palestina- Israel. Berkepanjangannya konflik ini di samping disebabkan karena dukungan yang membabi buta oleh Amerika Serikat terhadap Israel, tetapi juga karena struktur PBB khususnya struktur DK-PBB yang sejak aawal berdirinya memang tidak demokratis dan tidak representatif. Untuk itu, agar konflik ini dapat segera berakhir dan mimpi bangsa Palestina untuk memiliki sebuah Negara merdeka dan berdaulat penuh, mutlak dilakukannya restrukturisasi terhadap DK-PBB agar lebih demokratis dan representatif. Dalam kerangka inilah peran Organisasi Islam (OKI) sangat penting dan strategis untuk membangun solidaritas dan soliditas Negara-negara Islam dan Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim guna mendesak PBB untuk melakukan restrukturisasi diri menuju PBB yang lebih demokratis.

Kata Kunci : Palestina , OKI

A. Pendahuluan

Nasib tragis dan berkepanjangan yang dialami bangsa Palestina sejak tahun 1948 hingga kini sepertinya belum akan berakhir. Serangan-serangan secara brutal dan masif dengan menggunakan peralatan perang canggih dari pihak Israel terhadap rakyat Palestina dan serangan balasan dengan mempergunakan senjata konvensional buatan lokal dari pihak pejuang Palestina ke wilayah Israel

nampaknya juga akan semakin sering terjadi. Pihak Israel beralasan mempertahankan diri (self defence) dari serangan roket pejuang Palestina dan tentera Hamas, sementara pihak Palestina melakukan perlawanan karena embargo illegal (unilateral) yang dilakukan Israel terhadap wilayah pemukiman Gaza pasca kemenangan Hamas dalam Pemilu demokratis, di samping mereka juga merasa wilayah tanah airnya semakin sempit karena secara

sistematis dan masif dirampas pihak Israel.

Menurut para sarjana, faktor utama penyebab konflik bersenjata Palestina-Israel tetap berkepanjangan adalah karena pembelaan dan dukungan yang permanen dan secara membabi buta yang dilakukan negara Amerika Serikat (AS) terhadap Israel sekutu terdekatnya. Sebenarnya dukungan dan pembelaan secara permanen dan membabi buta AS terhadap Israel telah menjadi rahasia umum di dunia internasional. AS memberikan bantuan kepada Israel untuk menguasai Palestina dengan cara memberikan pinjaman, serta peralatan perang seperti senjata, pesawat tempur dan tank yang kesemuanya dimaksudkan untuk mempermudah upaya Israel menguasai Palestina.

Studi Hubungan Internasional menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara apapun bentuknya selalu bermuara pada upaya memperjuangkan kepentingan nasional (*national interest*)nya.

Kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah yang paling utama adalah kepentingan ekonomi dalam bentuk menjaga kelancaran pasokan minyak buat kelancaran industri dalam negerinya serta mempertahankan ekspor senjatanya ke kawasan ini. Untuk mempertahankan kepentingannya itu, AS membutuhkan dan mengandalkan Israel sebagai kekuatan militer utama di Timur Tengah, sekaligus menjaga eksistensi Israel sebagai "monster" bagi negara-negara Arab yang kaya raya dan memusuhinya. Logika ekonominya dengan selalu menjaga eksistensi Israel sebagai ancaman terbesar bagi keamanan negara-negara Arab yang petrodolar, maka negara Arab akan selalu membutuhkan impor senjata dari AS buat keamanan nasionalnya. Kerangka berpikir seperti inilah yang membuat kebijakan polugri AS di kawasan Timur Tengah selalu menggunakan standar ganda (*double standard*) dan sangat diskriminatif terhadap negara/bangsa yang memusuhi Israel sekutu utamanya,

Salah satu "senjata" yang digunakan AS dalam menjamin superioritas Israel di kawasan Timur Tengah adalah dengan memanfaatkan hak vetonya di Dewan Keamanan (DK) PBB, sehingga ada kalangan yang mengatakan bahwa dalam realitasnya penggunaan hak veto AS di DK-PBB tidak lebih dari hak AS untuk membela kebiadaban Israel dalam "menzalimi" bangsa Arab Palestina yang lemah dan nyaris tidak berdaya.

Penggunaan hak veto oleh AS dalam membela kebiadaban Israel, terakhir untuk Tahun 2006 misalnya, terjadi tanggal 20/10-2006 yakni dalam upaya AS menggagalkan resolusi DK-PBB guna mengecam pembantaian tentera Israel terhadap penduduk sipil Palestina¹. Pada hal, resolusi tersebut telah diamini mayoritas anggota tetap DK-PBB. Dari 15 Anggota tetap DK-PBB, 10 anggota menyatakan setuju, empat anggota lainnya abstain, dan satu anggota lagi menolak, yaitu AS sendiri.²

Berarti belum segenap setahun, AS telah mengeluarkan dua kali veto untuk menggagalkan resolusi DK-PBB. Pertama, 13 Juli 2006, yang menuntut agar Israel menarik mundur pasukannya dari Jalur Gaza. Kegagalan resolusi ini mengakibatkan sebuah pembantaian di Beit Hanoun, Rabu (17/10/2006), yang terletak di kawasan Utara di Jalur Gaza. Beit Hanoun yang secara harfiah berarti 'rumah kerinduan' mendadak menjelma menjadi 'rumah pembantaian' setelah diserbu secara membabi buta oleh serdadu Israel. Sebanyak 19 orang tewas seketika. Tiga belas orang berasal dari satu keluarga. Sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan, sedangkan 40 orang lainnya luka parah.³

Tindakan AS membela kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina terakhir terjadi tanggal 16 Desember 2008, yakni ketika DK-PBB mengeluarkan resolusi No. 1850 yang menyerukan dan meminta kepada Israel dan Palestina untuk menahan diri dalam melakukan penyerangan dan melanjutkan

1. Lihat, Romli, Mohammad, Guntur, 2006, *Hak Membela Kebiadaban*, Media Indonesia, Rabu, 16/11-2006.

2. Ibid.

3. Ibid

serta mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai. Resolusi ini gagal menghentikan perang Israel-Hamas yang saat itu telah menewaskan lebih dari seribu warga sipil Palestina serta belasan tentera dan warga sipil Israel, karena diveto oleh AS.

PBB tanggal 8 Januari 2009 akhirnya mengeluarkan resolusi No. 1860 yang pada intinya menyerukan Israel menghentikan agresinya ke Jalur Gaza, membuka semua perbatasan dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun, kendatipun substansi resolusi tersebut terkesan sangat lunak karena tidak memaksa secara tegas Israel keluar dari Gaza yakni dengan tidak mencantumkan batas waktu bagi Israel serta tidak dinyatakan sanksi jika Israel tidak mentaati resolusi tersebut,⁴ AS tetap menolak menyetuainya yakni dengan menyatakan sikap abstain.

Menurut Mahammad Gufron,⁵ sebagai pihak yang sangat lemah dan menderita akibat secara terus menerus menghadapi berbagai aksi kekerasan dari pihak yang menduduki dan menguasai wilayah mereka, rakyat Palestina tidak mungkin hanya dituntut untuk menerima kecaman akibat aksi perlawanan seperti aksi bom bunuh diri yang dilakukan terhadap kekejaman Israel. Rakyat Palestina tidak mungkin hanya dituntut untuk melakukan berbagai persyaratan yang diinginkan oleh pihak Israel sedangkan pihak Israel tidak mau memperhatikan pihak Palestina. Karena itu, kepada pihak Palestina perlu diberikan kompensasi, terutama antara lain dengan penarikan mundur pasukan Israel dari berbagai wilayah Palestina yang didudukinya setelah perang tahun 1967 serta pembongkaran pemukiman-pemukiman Israel yang dibangun di atas wilayah Palestina. Masalahnya, pihak manakah yang berkemampuan mendesak tuntutan tersebut kepada PBB, atau ke lembaga-lembaga internasional lainnya yang berkompeten untuk itu.

Lembaga yang paling diharapkan berperan untuk mendesak tuntutan Palestina ke PBB diantaranya adalah Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sebagai

organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB, peran OKI dalam mewujudkan Negara Palestina merdeka sebenarnya sangat strategis. Alasannya adalah disamping beranggotakan 57 negara dan 37 peninjau, anggota-anggota OKI juga terdiri dari Negara-negara berdaulat yang menguasai lebih dari dua pertiga produksi minyak dunia.

Sehubungan dengan uraian sebagaimana digambarkan di atas, beberapa permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah perkembangan konflik Palestina-Israel saat ini, bagaimanakah perkembangan konstelasi politik internasional kontemporer serta sejauh mana peran OKI, dan bagaimana pula implementasi politik luar negeri Indonesia dalam OKI serta peran apa yang dapat dimainkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia (*the biggest Muslim' state at the world*) dalam OKI guna mendorong terwujudnya negara Palestina merdeka?

B. Pembahasan

1. Politik Internasional Kontemporer dan Peran OKI

Memasuki awal abad ke-21 sekarang ini dunia terasa makin kecil berkat kemajuan ilmu, teknologi, komunikasi dan transportasi modern. Dalam dunia yang makin mengkerut itu, ketergantungan antar bangsa dan antar negara menjadi makin dalam, berhubung tidak mungkin ditemukan suatu negara modern yang dapat melangsungkan hidupnya tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lainnya. Negara paling kaya didunia dan paling maju dalam teknologi seperti Amerika Serikat (AS) misalnya tidak mungkin hidup secara "autarki" atau "self - sufficient" tanpa berhubungan dan bekerjasama dengan negara lain.

Saling ketergantungan (interdependensi) antar bangsa dan negara dewasa ini tidak saja terbatas pada bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi telah menyangkut hampir segala bidang kehidupan manusia termasuk bidang politik, militer, ilmu,

4. www.EraMuslim.Com. DK-PBB, AS memilih abstain, Israel tetap pada putusan sendiri.10/01/2009, sumber: harian kompas tanggal yang sama.

5. Muhamd Gufron, Muhammad, 2004. *Penyelesaian Konflik Palestina- Israel: Perlu Ada Kompensasi Bagi Palestina dalam "Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 106.

teknologi dan obat-obatan. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mampu mencapai taraf perkembangan ilmu, teknologi dan kemakmuran atau kesehatan seperti sekarang tanpa mendapat bantuan dari bangsa-bangsa lainnya.

Saling ketergantungan itu juga berlaku dibidang militer. Bukan saja berbagai negara berjual beli alat-alat militer, akan tetapi penentuan anggaran militer suatu negara juga ditentukan oleh perkembangan militer negara lainnya. Sebagai misal, dalam menentukan anggaran belanja militernya, pemerintah Amerika akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan persenjataan yang dicapai oleh Rusia

dan China. Demikian juga negara-negara Arab seperti Suriah, Jordania dan Iran akan selalu berusaha agar persenjataan yang mereka miliki tidak terlalu tertinggal jauh dari yang dimiliki Israel. Berdasarkan kenyataan ini nampak jelas bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat menentukan kebijaksanaan nasional sendiri, termasuk kebijaksanaan luar negerinya tanpa dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di negara lain. Sehubungan dengan kenyataan ini, Mohtar Mas'ood,⁶ menjelaskan munculnya interdependensi tiga lapis dalam hubungan internasional sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

**POLITIK DUNIA PASCA PERANG DINGIN:
INTERDEPENDENSI TIGA-LAPIS**

LAPISAN	ISYU	DISTRIBUSI KEKUATAN	IMPLIKASI
Atas	Militer	Unipolar: AS sebagai aktor utama (kekuatan hegemonik)	Penyelesaian persoalan militer dan keamanan tradisional pasti melibatkan AS.
Tengah	Ekonomi	Tripolar: AS, Jepang dan Uni Eropa	Penyelesaian persoalan ekonomi memerlukan kerjasama ketiga aktor ekonomi utama.
Bawah	Interdependensi transnasional (aktornya tidak hanya pemerintah/GO, tetapi juga NGO).	Kapasitas untuk menerapkan pengaruh tersebar meluas pada banyak negara, besar maupun kecil	Tidak ada negara yang bisa menyelesaikan secara sendiri masalah yang bersifat transnasional seperti: mobilitas kapital dalam pasar kapital global, penyebaran teknologi termasuk teknologi senjata nuklir, perdagangan obat bius, migrasi, pemanasan bumi, penyebaran penyakit AIDS, dsb

Setelah perang dingin berakhir, Barat memiliki pandangan dan kebijakan khusus terhadap dunia Islam. Di masa perang dingin, komunisme dianggap sebagai musuh utama, sehingga sering kali Barat bergandengan tangan dengan Islam menghadapi

Komunisme, seperti yang terjadi di Afghanistan. Setelah Komunisme runtuh, maka Barat seakan menemukan musuh baru sebagai pengganti komunisme. Musuh baru itu adalah Islam dan Convisionis.⁷ Kendatipun secara formal yang

6. Mas'ood, Mohtar, 1994, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, Handout 10/07/94, tanpa hlm, dalam Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

7. Teori ini diintrodusir oleh Samuel P. Huntington dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal *"Foreigu Affair"* vol. 72 no. 3, Summer 1993, hlm 22-49. Dalam artikel tersebut, Huntington mengemukakan teorinya tentang *"The clash of civilization"*, yakni benturan peradaban antara Barat vs Islam dan Convisionis

disebut-sebut sebagai musuh baru Barat setelah tumbangannya komunisme adalah Islam dan Convisionis, tetapi dalam realitanya yang sering menjadi sasaran serangan anarkisme Barat adalah Dunia Islam, antara lain dengan memanfaatkan isu perang melawan terorisme (*war on terrorism*).

Karena Islam dipandang sebagai ancaman potensial untuk meraih kekuasaan di Barat, maka berbagai daya upaya dilakukan untuk "menjinakkan" dan melemahkan Islam. Menurut Adian Husaini,⁸ salah satu program yang kini dilakukan Barat adalah dengan melakukan proyek liberalisasi Islam besar-besaran di Indonesia dan dunia Islam lainnya, termasuk liberalisasi di bidang regulasi nasionalnya.

Menurut Abdul Qadim Zallum,⁹ "keruntuhan Uni Sovyet pada awal dekade 1990-an abad ini pada hakekatnya bukanlah semata-mata kehancuran sebuah negara, tetapi lebih merupakan keruntuhan dan sekaligus akhir sebuah ideologi internasional dan berskala global. Sebab, pertarungan yang berkobar sesuai Perang Dunia II yang dikenal dengan sebutan "Perang Dingin" antara Blok Barat pimpinan AS dengan Blok Timur pimpinan Uni Sovyet (US) bukan semata-mata merupakan pertarungan global antar dua blok tersebut, tetapi juga merupakan pertarungan keyakinan antar dua ideologi, yakni Kapitalisme versus Sosialisme.

Oleh karena itu, wajar jika AS dan Blok Barat umumnya beranggapan bahwa keruntuhan Uni Sovyet dan sekaligus kehancuran ideologi Sosialisme ini merupakan kemenangan bagi ideologi Kapitalisme sebagai suatu sistem dan metode kehidupan.

Kehancuran Sosialisme, otomatis menjadikan Kapitalisme menjadi pemain tunggal dalam percaturan politik internasional kontemporer, sebab, di luar Kapitalisme, memang tidak ada lagi negara di dunia ini yang mengemban ideologi lain dan menjalankan strategi politik internasionalnya atas dasar ideologi tersebut. Namun demikian, ditinjau dari segi eksistensinya secara universal, sesungguhnya tetap terdapat dua ideologi, yakni Islam dan

Kapitalisme.

Serangan global AS untuk menjadikan Kapitalisme sebagai ideologi bagi seluruh umat manusia di muka bumi, memang tidak menghadapi perlawanan apapun, kecuali di dunia Islam. Hal ini dapat difahami, karena memang hanya umat Islamlah satu-satunya umat non-kapitalis diantara bangsa dan umat yang ada di dunia ini yang mempunyai dan menganut sebuah ideologi, kendati memang mereka saat ini tidak hidup berlandaskan dan tidak menyebarkanluaskannya ke seluruh dunia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa serangan AS untuk mengglobalkan Kapitalisme tidaklah menghadapi lawan yang tangguh, kecuali di Dunia Islam.

Ambisi AS untuk melemahkan Dunia Islam, kemudian mendapatkan momentumnya dengan tragedi 11 September 2001 (serangan terhadap gedung WTC dan gedung pertahanan Pentagon). Sejak peristiwa tragis tersebut, AS telah melakukan perubahan drastis dalam poligrinya dari strategi pembendungan (*containment*) dan penangkalan (*deterrence*) menjadi serangan dini (*pre-emptive attack/strike*) dan intervensi defensif (*devesive intervension*). Penggunaan konsep *pre-emptive strike* (serangan dini) merupakan strategi keamanan AS yang paling kontroversial dalam menghadapi ancaman terorisme. Berdasarkan strategi *pre-emptive strike* ini pulalah AS meligitimasi aksinya ke Afghanistan dan Irak, serta mengancam negara-negara lainnya agar menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan kepentingan AS dalam memerangi terorisme internasional.

Mardenis (2010), menulis bahwa dalam batas-batas tertentu, ambisi AS melemahkan Dunia Islam tersebut dapat dikatakan telah menjadi kenyataan, antara lain terlihat dengan semakin marginalnya peran dunia Islam dalam percaturan konstelasi politik internasional. Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai eksekutor setiap keputusan PBB khususnya di bidang politik dan keamanan misalnya, saat ini diisi oleh lima negara besar anggota tetap sebagai pemegang hak

8 Husaini, Adian, 2006, *Liberalisasi Islam di Indonesia*, makalah disampaikan pada Forum Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKS-PPI) di Bogor, 2 April 2006, hlm. 52

9 Zallum Qadim, Abdul, 2001, *Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Jakarta, hlm. 1

veto, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China. Dikaitkan dengan keberadaan agama besar di dunia saat ini, maka AS, Inggris dan Prancis dapat dikatakan mewakili agama/dunia Kristen, sedangkan Rusia dan China mewakili agama Budha, dan Konghuchu. Lalu, mana pemegang hak veto yang mewakili Dunia Islam? Jawabannya jelas tidak/belum ada, padahal konflik internasional yang sifatnya laten saat ini justru berada di wilayah Dunia Islam, khususnya konflik di Palestina. Karena itu, tidaklah mengherankan jika berhadapan dengan konflik Arab-Israel, maka peran PBB menjadi mandul.¹⁰

Impotensi PBB (terutama berhadapan dengan aksi brutal Israel di Palestina) lantaran struktur dan aturan main yang tidak adil. Sejak berdiri pada 24 Oktober 1945, organisasi ini jelas hanya menguntungkan lima anggota tetap DK yang memiliki hak veto tersebut. Hak istimewa ini membuat kelima negara-negara berkuatan nuklir itu dapat membatalkan sebuah resolusi yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Sampai tahun lalu (2009) tercatat, Rusia telah 123 kali menggunakan hak veto, disusul AS (82 kali), Inggris (32 kali), Prancis (18 kali), dan Cina (6 kali).¹¹

Sejak awal berdirinya, PBB yang seharusnya representasi dari kepentingan masyarakat internasional memang terlihat tidak berdaya bila berhadapan dengan kepentingan negara-negara besar pemilik hak veto serta kepentingan negara-negara sekutunya. Berkaitan dengan Palestina misalnya, PBB telah gagal membantu pendirian negara Palestina merdeka seperti diamanatkan Resolusi Majelis Umum No. 181 pada 29 November 1947. Resolusi ini membagi dua wilayah mandate Inggris, yakni untuk kaum Yahudi dan untuk warga Arab. Yang terjadi, kelompok Zionis yang dipimpin oleh David Ben Gurion, perdana menteri pertama Israel, mendeklarasikan kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, persis ketika mandate Inggris berakhir.

PBB sebagai lembaga dunia yang seharusnya berpengaruh dan disegani itu juga tidak mampu

mencegah meletusnya perang enam hari 1967, yang mengakibatkan wilayah Israel makin luas. Mereka berhasil merebut Tepi Barat dan Jalur Gaza dari Yordania, Dataran Tinggi Golan milik Suriah, serta Gurun Sinai milik Mesir. PBB juga diam saat Israel secara sepihak menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota abadi mereka yang tidak dapat dibagi dua dengan Palestina. Padahal kota suci tiga agama itu (Islam, Yahudi, dan Nasrani) sudah dinyatakan di bawah kontrol PBB.

PBB pun tidak berupaya mencegah kampanye kotor AS dan Israel agar tidak mengakui kemenangan Hamas pada pemilu demokratis 25 Januari 2006. Mereka mencap organisasi anti-Israel tersebut sebagai kelompok teroris. Kedua negara tersebut, sebaliknya bahkan memprovokasi Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmud Rida Abbas, sehingga pecah bentrokan di antara kedua faksi. Pubcaknya, pemerintahan persatuan nasional Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ismail Haniyah dari Hamas bubar. Implikasinya kemudian, Palestina terbelah, Hamas menguasai Jalur Gaza, dan Fatah menguasai Tepi Barat.

Israel bahkan mengisolasi Gaza, yang berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Perbatasan darat, laut, dan udara ditutup sehingga lalu lintas orang, barang, dan jasa sangat terbatas. Pasokan bahan makanan, obat-obatan, air, listrik, dan material lainnya menipis. Alhasil, krisis kemanusiaan meletup di Gaza. PBB juga tidak berkutik menghadapi pembangunan tembok pemisah yang dibangun pemerintah Israel di Tepi Barat.

Namun, sungguh ironis. Negara-negara Arab dan muslim (tidak terkecuali Indonesia) masih mengandalkan PBB untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ini pantas disebut sebagai kebodohan, karena mereka terus mempercayai sistem yang telah berkali-kali terbukti gagal. Anehnya, mereka juga tidak merasa malu, meski Israel sudah menginjak-nginjak martabat mereka lantaran tidak

10 Mardenis, dalam "Restrukturisasi PBB untuk Negara Palestina Merdeka" Jurnal Konstitusi PUSAKO Universitas Andalas, Volume III Nomor 2, November, 2010, hlm. 98.

11 Lihat, Faisal Assegaf dalam "PBB Baru demi Palestina", Tempo, 21-1-2009.

menghormati prinsip hak asasi yang dianut PBB.

Sebenarnya desakan untuk mengakhiri impotensi PBB yang terutama disebabkan oleh faktor struktur PBB sendiri yang sejak lahirnya memang tidak demokratis dan tidak representatif, sudah sejak lama disuarakan terutama oleh negara-negara berkembang. Namun suara-suara kritis tersebut tidak mendapatkan respon positif terutama dari negara-negara maju pemilik hak veto tersebut. Akhirnya suara kritis tersebut mulai mendatangkan harapan dan sedikit optimisme sejak 2005, yakni untuk pertama kalinya reformasi dan rekonstruksi PBB mulai ditangani secara komprehensif pada KTT PBB tanggal 14-16 September 2005. KTT menghasilkan dokumen akhir yang dinamakan "2000 World Summit Outcome" yang mencakup masalah-masalah utama dan langkah-langkah kongkrit tentang reformasi PBB, antara lain: reformasi di bidang pembangunan, perdamaian dan keamanan kolektif, penggunaan kekuatan, terorisme, pembentukan *Peacebuilding Commission*, tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari *genosida* ("responsibility to protect"), kejahatan perang, *ethnic cleansing* (pembersihan etnis) dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta reformasi Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, pembentukan dewan HAM, reformasi Sekretariat dan amandemen Piagam PBB.¹² Namun keberhasilan ini tetap tidak dapat menutup kekecewaan banyak kalangan anggota PBB, termasuk Indonesia. Kekecewaan tersebut disebabkan kegagalan KTT dalam menyetujui langkah-langkah yang sangat penting, yakni berupa penambahan keanggotaan anggota tetap DK PBB yang merupakan isu paling krusial sejak PBB didirikan. Disebut sebagai isu paling krusial dalam struktur PBB, karena sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa keberadaan anggota tetap DK PBB pemilik hak veto tersebut sama sekali tidak demokratis dan tidak representatif, karena tidak mewakili semua wilayah/kawasan dunia dan tidak

mewakili semua komunitas agama-agama besar yang ada di dunia.

Karena itu jika Dunia Islam ingin suara mereka didengar dan negara Palestina merdeka benar-benar berdiri, Dunia Islam dengan memanfaatkan institusi OKI—mungkin juga Gerakan Non-Blok— harus secara lebih gigih dan lebih keras lagi menuntut reformasi dan restrukturisasi PBB yang sekarang. Pilihannya hanya dua: menghapus hak veto atau meminta salah satu jatah anggota tetap DK dengan hak veto bagi negara Arab atau muslim anggota OKI. Untuk itu semua, mutlak diperlukan soliditas dan solidaritas diantara negara-negara anggota OKI untuk mendorong dilakukannya amandemen terhadap Piagam PBB.

Tentu saja lima sekawan anggota DK yang telah mapan sekarang ini akan menolak dua usulan di atas. Karena itu, negara-negara anggota OKI harus keluar dari PBB dan membentuk blok baru yang berani bersikap tegas terhadap Israel, AS, dan para sekutunya. Bukan seperti selama ini, dimana OKI sepertinya tidak bertaji

2. Politik Luar Negeri Indonesia dan OKI

Politik luar negeri sebuah negara—baik sebagai *policies* maupun *actions*—senantiasa terkandung di dalamnya unsur kesinambungan dan perubahan yang saling berinteraksi. Kesinambungan atau lebih tepat keajegan biasanya meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di negara itu serta prinsip-prinsip bernegara yang disepakati; sementara perubahan menyangkut strategi, prioritas dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya.¹³

Dalam kaitannya dengan Indonesia, pada KTT III OKI tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia secara resmi menjadi anggota OKI dan turut menandatangani piagam OKI. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu Negara anggota **OKI pemula**. Bahkan di dalam pertemuan-pertemuan resmi, Indonesia dianggap

12 Lihat, Nugroho Wisnumurthi, dalam "United Nations Reform: Success And Failure", Jurnal Hukum Internasional (*Indonesian Journal of International Law*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 3 Nomor 1 Oktober 2005, hlm. 1

13 Lihat, Sriyono, Agus, A, 2004, *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Zaman yang Berubah*, dalam "Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3

telah menjadi anggota OKI sejak tahun 1969.

Sebagai peserta, Indonesia telah berperan secara aktif dalam OKI, baik dalam kegiatannya maupun dengan sumbangan yang diberikan kepada organisasi ini dalam rangka meningkatkan kesiakawanan antara anggota OKI, disamping untuk membina kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya dan bidang-bidang lainnya yang semuanya dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan nasional Indonesia di segala bidang.¹⁴

Menurut Hajriyanto Y. Thohari¹⁵, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia dipandang masyarakat dunia sebagai negara yang dapat mensinergikan antara Islam dan demokrasi. Indonesia berhasil membuktikan bahwa antara Islam dan demokrasi adalah *compatible*. Dengan prediket tersebut, Indonesia (sebenarnya) bisa memainkan peran penting dalam tata kelola dunia yang lebih adil, damai dan beradab sebagaimana yang diamanatkan UUD Negara RI Tahun 1945.

Namun, karena peran yang belum optimal tersebut, maka selama ini peran Indonesia dalam konstelasi politik internasional dapat dikatakan tidak begitu menonjol, jika tidak disebut marginal. Menurut penulis, semua itu terjadi, terutama sangat dipengaruhi oleh kultur politik pemimpin Indonesia selama ini yang cenderung sangat alergi terhadap konflik dan terlalu lebih mengutamakan "harmoni" ("*sefty first leader*"). Saat ini jangankan untuk membangun kekuatan buat mendorong PBB melakukan restrukturisasi internal, untuk mengupayakan dilakukannya renegotiasi terhadap perjanjian Indonesia dengan PT. Freeport mengenai tambang emas di Jayapura saja, rezim yang berkuasa saat ini tidak berdaya, padahal sangat jelas kontrak dengan PMA tersebut tidak saja sangat merugikan Indonesia secara materiel, tapi juga sangat merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara besar yang telah lebih

setengah abad merdeka. Karena itu, agar peran Indonesia ke depan dalam konstelasi politik internasional khususnya dalam memperjuangkan kepentingan Dunia Islam bisa lebih optimal, maka Indonesia membutuhkan tipe pemimpin yang memiliki karakter dan ideologi yang kuat yang berani melakukan terobosan-terobosan politik internasional yang saat ini tengah dilanda oleh fenomena stagnan dan anarkhis terutama ditandai dengan tindakan unipolar AS dan sekutunya terhadap beberapa negara Islam khususnya di Timur Tengah.

Dalam kaitannya dengan perjuangan bangsa Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, maka dengan persetujuan UNESCO pada tanggal 31 Oktober 2011 yang lalu yang menyetujui keanggotaan penuh Palestina di organisasi internasional tersebut, hal itu telah merupakan suatu langkah maju menuju Palestina untuk juga menjadi anggota penuh PBB. Namun kendala utama yang akan dihadapi Palestina ke arah itu adalah persyaratan administrasi yang diharuskan ketentuan pasal 4 Piagam PBB yang mengharuskan dipenuhinya empat syarat oleh setiap negara untuk dapat diterima menjadi anggota PBB, yakni: 1) negara cinta damai, 2) menerima kewajiban sebagai anggota PBB, 3) mendapatkan rekomendasi dari anggota DK-PBB, dan 4) ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, Palestina setidaknya harus mendapatkan persetujuan (rekomendasi) sembilan dari lima belas anggota DK-PBB, tanpa satu pun dari lima anggota tetap DK-PBB yang memvetonya. Persyaratan yang disebut terakhir inilah yang paling sulit didapatkan Palestina, karena saat ini saja sejak Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mewacanakan akan mengajukan permohonan resmi untuk menjadi anggota penuh PBB, AS langsung menyatakan akan memveto upaya Palestina tersebut. Presiden AS, Obama, menyatakan bahwa "rakyat Palestina berhak mendirikan negara, namun itu harus dilakukan melalui

14 <http://www.ditjenkpi.depdag.go.id> terakhir diakses tanggal 30 Januari 2011 pukul 21.000

15 Hajriyanto Y. Thohari (Wakil Ketua MPR-RI dan Ketua DPP Golkar), dalam "Peran Parlemen Dalam Meningkatkan Kerjasama Negara-Negara OKI" Tabloid Diplomasi, Kementerian Luar Negeri Indonesia, No. 42 Tahun IV, 15 April-14 Mei 2011, hlm. 16

dialog dengan Israel".¹⁶

Pernyataan Presiden AS sebagaimana dikutip di atas sekali lagi menunjukkan keberpihakan yang membabi buta dan tanpa reserve dari pemerintah AS terhadap kepentingan negara sekutu paling dekatnya, yakni Israel. Logika hukum dan politiknya adalah, bagaimana mungkin suatu negara Palestina yang merdeka dan berdaulat akan terwujud, kalau kelahirannya saja harus atas persetujuan (baca: izin) negara Israel yang telah sejak puluhan tahun yang lalu menjadi musuh utama dan bebuyutan bangsa Palestina. Karena itu, dibutuhkan kesoliditan negara-negara anggota OKI yang pada umumnya memiliki daya tawar yang relatif cukup besar, yakni dengan kekayaan minyak yang mereka miliki dan yang dalam batas-batas tertentu negara AS dan sekutunya sangat membutuhkannya. OKI harus melakukan upaya maksimal dalam bentuk penekanan secara kolektif kepada AS agar bersedia menyetujui atau setidaknya bersikap abstein di DK-PBB atas rencana Palestina menjadi anggota penuh PBB, yang tentunya dengan beberapa pemberian konsesi dan "reward" atas kesediaan AS tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota utama OKI seharusnya lebih mampu memainkan peran nyata terutama dalam mendukung terwujudnya negara Palestina merdeka. Peran yang paling mendesak yang harus dimainkan Indonesia dalam kerangka OKI misalnya membangun soliditas dan solidaritas antara sesama negara anggota OKI agar dapat memberikan tekanan yang lebih nyata terhadap AS agar bersedia meninggalkan kebijakan standar ganda dalam kebijakan politik luar negerinya, terutama dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Menurut Alwi Shihab¹⁷, sekarang ini saatnya bagi Indonesia untuk berperan lebih besar di OKI, karena pertama, Indonesia sangat dihormati oleh negara-negara (anggota) OKI. Kedua, Indonesia dianggap sebagai model, sebagai *bridge builder* antara Barat dengan dunia Islam, dan sekaligus juga Indonesia

bisa menunjukkan dirinya sebagai model yang baik bagi keserasian antara Islam, modernitas dan demokrasi.

Kritis politik yang melanda sebagian besar negara-negara di kawasan Timur Tengah yang seluruhnya merupakan anggota OKI sejak awal Januari 2011, semakin mempersulit harapan bangsa Palestina untuk mendapatkan dukungan penuh bagi terwujudnya negara Palestina merdeka dan berdaulat. Hal itu tidak sulit dipahami, karena kondisi tersebut memaksa para pemimpin negara-negara anggota OKI tersebut lebih mencurahkan seluruh perhatian dan energinya pada urusan politik domestik negara masing-masing. Kondisi tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa umat Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah benar-benar membutuhkan "role of model" dalam proses transisi menuju demokrasi. Dalam kaitan ini, Indonesia sebagai salah satu negara anggota OKI dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selama krisis politik yang melanda berbagai negara di kawasan ini masih berlangsung, maka selama itu pula harapan Palestina untuk mendapatkan dukungan penuh dari mereka semakin sulit. Karena itu, kontribusi nyata Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas politik di kawasan ini, pada akhirnya akan berpengaruh besar dan signifikan dalam upaya mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat.

Peluang Indonesia untuk memimpin OKI semakin terbuka pada KTT OKI yang direncanakan akan diselenggarakan tahun 2014 di Jakarta. Pemerintah Indonesia memiliki modal dasar yang kuat terkait dengan peranan-peranan di dunia internasional, khususnya di kalangan negara-negara anggota OKI. Pertama, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia akan menjadi kekuatan penting pada abad ke 21 terkait dengan pembangunan demokrasi.

16 <http://www.bbc.co.uk/Indonesia/dunia/2011/09/110921-obama-palestina.shtml>, diakses terakhir Pada 21 September 2011, jam 22.53 WIB.

17 Shihab, Alwi, 2011, "Saatnya Indonesia Berperan Lebih Besar Dalam OKI", Tabloid Diplomasia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, No. 42 Tahun 1V, Tgl. 15 April-14 Mei 2011, hlm. 11.

Kedua, Indonesia dipandang mampu untuk berperan sebagai "teladan" (*role of model*) bagi keserasian antara Islam, modernitas dan demokrasi damai, serta sebagai *bridge builder* (pembangun jembatan) hubungan Barat dan Islam. Ketiga, sebagai ketua ASEAN, posisi Indonesia semakin diperhitungkan. Kini persoalannya adalah terletak pada mampu tidaknya Indonesia mengelola berbagai potensi strategis tersebut bagi dirinya dan bagi memaksimalkan dukungannya buat mewujudkan mimpi bangsa Palestina memiliki negara merdeka dan berdaulat.

C. Simpulan

Sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis ingin menegaskan kembali bahwa kelemahan mendasar OKI sejak awal berdirinya adalah rendahnya tingkat soliditas dan solidaritas diantara negara-negara anggotanya, terutama dalam menyikapi perkembangan konflik Israel-Palestina.. Karena itu tidaklah mengherankan jika sejak berdiri 1969, organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB ini hanya mampu bersikap reaktif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi Dunia Islam, termasuk yang dihadapi bangsa Palestina dalam perjuangannya melawan negara zionis Israel. Sebaliknya kelemahan mendasar yang mendera umat Islam saat ini baik pada tingkat lokal, nasional bahkan internasional adalah semakin jauhnya umat Islam dari pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya secara kaffah, bahkan tidak jarang saat ini banyak umat Islam yang merasa "asing" dengan ajaran agamanya sendiri, termasuk tidak peduli dengan nasib tragis yang dialami saudaranya seiman di negara lain. Akibatnya umat Islam, terutama di Palestina tetap menjadi bulan-bulanan oleh keganasan mesin perang Israel dan tidak satu negara Islam/Muslim pun saat ini yang berani menghalanginya, bahkan sekedar berempati dan memanjatkan doapun mungkin tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hadi, Abdullah, 2008, *Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika*, Bandung: CV. Angkasa.
- Assegaf, Faisal, 2009, *PBB Baru Demi Palestina*, dalam Harian Tempo, 21 Januari 2009
- Djelantik, Sukawarsini, 2010, "Minyak Dalam Diplomasi dan Politik Global" *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol.6, No. 1, Bandung, Maret 2010.
- Findley, Paul, 2006, *Diplomasi Munafik Zionis Israel*, Jakarta: Mizan.
- Gufron, Muhammad, 2004, *Penyelesaian Konflik Palestina: Perlu Ada Kompensasi Bagi Palestina*, dalam "Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, Samuel P, *The Clash of Civilization*, dalam *Foreign Affairs*, Volume 72, No. 3 Summer, 1993
- Husaini, Adian, 2006, *Liberalisasi Islam di Indonesia, Tantangan Utama Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam*, makalah, disampaikan dalam Forum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Bogor, 20 April 2006
- Ibnu Burdah, Ibnu, 2008, *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mardenis, 2010, *Restrukturisasi PBB Dalam Mewujudkan Negara Palestina Merdeka*, *Jurnal Konstitusi*, diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume III Nomor 2, November 2010.
- Mas, oed, Mohtar, 1994, *Teori dan Metode Hubungan Internasional*, Handout, 10/97/94, tanpa halaman
- M. Sabir, 1987, *Politik Bebas Aktif*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

- Romly, 2006., *Guntur, Mohammad, Hak Membela Kebiasaan*, harian Media Indonesia, Rabu, 16-11-2006.
- Shihab, Alwi, (Utusan Khusus Presiden RI Untuk Timur Tengah), 2011 "Saatnya Indonesia Berperan Lebih Besar Dalam OKI", dalam Tabloid Diplomasi, Kementerian Luar Negeri Indonesia, No. 42, Tahun 1V, Tgl. 15 April – 14 Mei 2011.
- Singadilaga, Dudi, 1973, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sriyono, Agus, dkk, 2004, *Hubungan Internasional, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zallum, Qadim, Abdullah, 2001 *Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam (Terj.)*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Wisnumurthi, Nugroho, 2005, *United Nation: Succes and Failure*, Jurnal Hukum Internasional (*Indonesian Journal of International Law*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2005.